



PEMERINTAH KABUPATEN BLAK NUMFOR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KABUPATEN
BLAKNUMFOR | 2019





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Laporan Kinerja menyajikan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor serta penjelasan tentang capaian kerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor. Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *clean government & good government*.

Informasi tingkat keberhasilan atau kinerja (*performance*) Kabupaten Biak Numfor selama Tahun 2019 diukur berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja program dengan indikator capaian tertentu yang ditetapkan di dalam RPJMD sebagai tolak ukur analisis capaian kinerja dimaksud.



Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi media informasi eksternal publik sekaligus menjadi alat koreksi internal penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. Disadari bahwa berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai pelaksanaan tugas serta upaya implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ke depan. Namun dengan keyakinan dinamis, inspiratif, inovatif serta keinginan dan kemauan untuk berubah terus menjadi lebih baik, bersama dan bersatu hati kita bisa jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang keberhasilan di masa datang.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Biak, 30 April 2020

BUPATI BIAK NUMFOR



HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor 2019-2023 merupakan kebijakan yang mengatur penyempurnaan indikator kinerja dalam RPJMD, telah menetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dimana telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sasaran yang telah dilakukan pengukuran telah berhasil dicapai dengan Sangat Berhasil yaitu 135,2%.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kabupaten Biak Numfor, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	2
C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	3
D. PERANGKAT DAERAH	6
E. SUMBER DAYA APARATUR	8
F. SUMBER DAYA KEUANGAN	11
G. ISU-ISU STRATEGIS	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. VISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023	20
B. MISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023	21
C. PERENCANAAN KINERJA KAB. BIAK NUMFOR TA. 2019	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. REALISASI ANGGARAN	55
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2019	5
1.2 JUMLAH ASN KAB. BIAK NUMFOR BERDASARKAN GOLONGAN	9
1.3 JUMLAH ASN BERDASARKAN JENIS JABATAN	10
1.4 JABATAN STRUKTURAL ASN KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2019.....	10
1.5 APBD KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019.....	11
2.1 MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. BIAK NUMFOR TA. 2019-2023	21
2.2 PERJANJIAN KINERJA BUPATI BIAK NUMFOR TAHUN 2019	23
3.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2019	25
3.2 REALISASI INDIKATOR SASARAN 1 TAHUN 2019	26
3.3 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 1 TERHADAP TARGET RPJMD	29
3.4 REALISASI INDIKATOR SASARAN 2 TAHUN 2019	30
3.5 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 TERHADAP TARGET RPJMD	31
3.6 REALISASI INDIKATOR SASARAN 3 TAHUN 2019	32
3.7 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 3 TERHADAP TARGET RPJMD	32
3.8 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 3 TAHUN 2019	33
3.9 REALISASI INDIKATOR SASARAN 4 TAHUN 2019	37
3.10 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 4 TERHADAP TARGET RPJMD	39
3.11 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 4 TAHUN 2019	40
3.12 REALISASI INDIKATOR SASARAN 5 TAHUN 2019	42
3.13 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 5 TERHADAP TARGET RPJMD	45
3.14 REALISASI INDIKATOR SASARAN 6 TAHUN 2019	47



3.15 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 6 TERHADAP TARGET RPJMD	47
3.16 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 6 TAHUN 2019	47
3.17 REALISASI INDIKATOR SASARAN 7 TAHUN 2019	50
3.18 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 7 TERHADAP TARGET RPJMD	51
3.19 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 7 TAHUN 2019	51
3.20 REALISASI INDIKATOR SASARAN 8 TAHUN 2019	53
3.21 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 8 TERHADAP TARGET RPJMD	54
3.22 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019	56
3.23 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2019	66



BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



B. KEWENANGAN PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan tema pembangunan dan program prioritas Tahun 2019, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor dijabarkan dalam 2 (dua) urusan, diantaranya urusan wajib dan urusan pilihan yang terdiri atas :

1) Urusan Wajib, yaitu :

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar :

- ✓ Pendidikan;
- ✓ Kesehatan;
- ✓ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- ✓ Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- ✓ Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas;
- ✓ Sosial.

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar :

- ✓ Tenaga Kerja;
- ✓ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- ✓ Pangan;
- ✓ Pertanahan;
- ✓ Lingkungan Hidup;
- ✓ Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- ✓ Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- ✓ Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- ✓ Perhubungan;
- ✓ Komunikasi dan Informasi;
- ✓ Koperasi dan UKM;
- ✓ Penanaman Modal;
- ✓ Kepemudaan dan Olahraga;
- ✓ Statistik;
- ✓ Persandian;
- ✓ Kebudayaan;
- ✓ Perpustakaan dan Arsip;
- ✓ Bencana.



- 2) Urusan Pilihan, yaitu :
 - ✓ Perikanan;
 - ✓ Pariwisata;
 - ✓ Pertanian;
 - ✓ Perindustrian; dan
 - ✓ Perdagangan.
- 3) Fungsi Penunjang :
 - ✓ Perencanaan;
 - ✓ Keuangan
 - ✓ Kepegawaian dan diklat
 - ✓ Pengawasan

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019.

C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1) Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Biak Numfor terletak disebelah utara daratan Papua, tepatnya di Teluk Cendrawasih. Secara astronomi terletak pada $0^{\circ} 55' - 1^{\circ} 27'$ Lintang Selatan dan $134^{\circ} 47' - 136^{\circ}$ Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor, serta sekitar 42 pulau-pulau kecil di Kepulauan Padaido.

Kabupaten Biak Numfor secara administrasi berada di wilayah administrasi Provinsi Papua. Luas wilayah Kabupaten Biak Numfor yaitu 2.602 km^2 daratan dan luas wilayah perairan yaitu $19.591.63 \text{ Km}^2$, dan terbagi atas 19 Distrik, 8 Kelurahan dan 257 Kampung.

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Biak Numfor memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Supiori, Samudera Pasifik

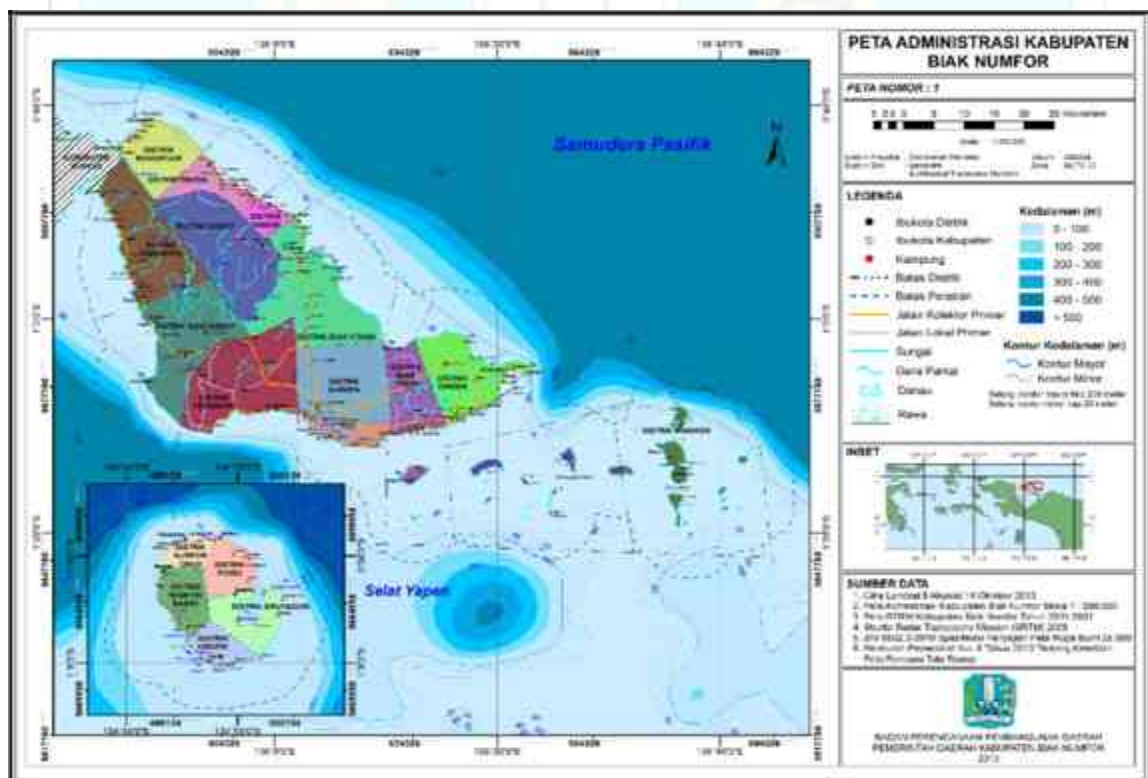
Sebelah Timur : Samudera Pasifik

Sebelah Selatan : Selat Yapun

Sebelah Barat : Kabupaten Manokwari

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Biak Numfor



Sumber Data : RTRW Kabupaten Biak Numfor 2011-2031

2) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor berjumlah sebesar 145.425 jiwa, sebagian besar bermukim dan menetap di Ibukota Kabupaten. Hal ini disebabkan serapan lapangan pekerjaan masih terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten. Dengan luas wilayah 2.602 km², maka tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 sebesar 145.425 jiwa atau 38.691 KK.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019

Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	NAMA DISTRIK	JENIS KELAMIN		PENDUDUK (Jiwa)	KELUARGA (KK)
		Laki-Laki (Lk)	Perempuan (Pr)		
1	BIAK KOTA	22.317	21.947	44.264	12.708
2	BIAK UTARA	3.800	3.672	7.472	1.787
3	BIAK TIMUR	4.159	4.027	8.186	2.157
4	NUMFOR BARAT	1.144	987	2.131	478
5	NUMFOR TIMUR	915	810	1.725	447
6	BIAK BARAT	3.463	3.189	6.652	1.529
7	WARSA	2.839	2.639	5.478	1.285
8	PADAIDO	1.070	985	2.055	510
9	YENDIDORI	4.485	4.234	8.719	2.224
10	SAMOFA	18.315	17.657	35.972	10.325
11	YAWOSI	1.128	1.079	2.207	528
12	ANDEY	1.304	1.216	2.520	556
13	SWANDIWE	2.089	1.924	4.013	886
14	BRUYADORI	1.131	1.043	2.174	449
15	ORKERI	1.066	917	1.983	483
16	POIRU	1.029	868	1.897	439
17	AIMANDO PADAIDO	1.203	1.105	2.308	524
18	ORIDEK	2.618	2.557	5.175	1.252
19	BONDIFUAR	268	226	494	124
JUMLAH		74.343	71.082	145.425	38.691

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Capil Tahun 2019



D. PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kemudian dilakukan perbaikan terkait Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Adapun susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Dinas Pendidikan & Kebudayaan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - f. Dinas Perhubungan
 - g. Dinas Perikanan
 - h. Dinas Pariwisata
 - i. Dinas Sosial
 - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - k. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - o. Dinas Lingkungan Hidup
 - p. Dinas Tenaga Kerja
 - q. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - r. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - s. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 - t. Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Badan terdiri dari :
- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - f. Badan Pendapatan Daerah
- 6) Distrik terdiri dari :
- a. Distrik Biak Kota
 - b. Distrik Samofa
 - c. Distrik Yendidori
 - d. Distrik Biak Barat
 - e. Distrik Swandiwe
 - f. Distrik Biak Utara
 - g. Distrik Andey
 - h. Distrik Yawosi
 - i. Distrik Warsa
 - j. Distrik Bondifuar
 - k. Distrik Biak Timur
 - l. Distrik Oridek
 - m. Distrik Padaido
 - n. Distrik Aimando



- o. Distrik Numfor Timur
 - p. Distrik Numfor Barat
 - q. Distrik Orkeri
 - r. Distrik Poiru
 - s. Distrik Bruyadori
- 7) Kelurahan terdiri dari :
- a. Kelurahan Mandala
 - b. Kelurahan Fandoi
 - c. Kelurahan Burokub
 - d. Kelurahan Waupnor
 - e. Kelurahan Saramom
 - f. Kelurahan Samofa
 - g. Kelurahan Brambaken
 - h. Kelurahan Karang Mulia

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terdiri atas 4 UPTD yaitu:

- 1) UPTD Metrologi
- 2) UPTD Loka Latihan Kerja
- 3) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal
- 4) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah kelas C

E. SUMBER DAYA APARATUR

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun pegawai. Hingga Desember tahun 2019, jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mencapai 4.150 orang. Dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Kondisi PNS Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Pangkat dan Golongan terdiri dari :



Tabel 1.2
Jumlah ASN Kabupaten Biak Numfor
Berdasarkan Golongan

Golongan/Ruang	JUMLAH
IV/e	0
IV/d	0
IV/c	13
IV/b	43
IV/a	274
Jumlah golongan IV	330
III/d	431
III/c	360
III/b	525
III/a	659
Jumlah golongan III	1.975
II/d	302
II/c	366
II/b	368
II/a	655
Jumlah golongan II	1.694
I/d	29
I/c	96
I/b	18
I/a	11
Jumlah golongan I	154
Total Golongan I,II,III & IV	4.150

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2019



2) Berdasarkan Jenis Jabatan

Kondisi jumlah pegawai Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 berdasarkan jenis jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Jumlah ASN berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan		Jumlah
Jabatan Pimpinan Tinggi	Pimpinan Tinggi Pratama	26
Jabatan Administrasi	Administrator	95
	Pengawas	133
	Pelaksana	2127
Jabatan Fungsional	Keahlian	472
	Keterampilan	1297
Jumlah		4150

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2019

3) Jabatan Struktural

Kondisi Jabatan Struktural pada Setda, Setwan, Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, RSUD, Distrik dan Kelurahan sebagai berikut :

Tabel 1.4

Jabatan Struktural ASN Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019

No.	ESELON	JUMLAH
1	Jabatan Eselon II	35
2	Terisi	9
3	Lowong/Belum Terisi	26
3	Jabatan Eselon III	191
4	Terisi	96
	Lowong/Belum Terisi	95
5	Jabatan Eselon IV	524
6	Terisi	118
	Lowong/Belum Terisi	406

Sumber Data: BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2019



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019

F. SUMBER DAYA KEUANGAN

APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 disajikan pada
Tabel berikut :

Tabel 1.5 APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
4	PENDAPATAN - LRA	1.339.909.658.379,56
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	111.056.146.086,27
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	9.104.547.950,80
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	3.744.650.915,20
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	98.206.947.220,27
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	987.168.283.293,29
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	914.702.016.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	32.258.636.567,29
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	29.621.230.726,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	10.586.400.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	241.685.229.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	38.969.098.000,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	202.716.131.000,00
5	BELANJA	1.046.953.218.286,71
5.1	BELANJA OPERASI	814.896.541.737,12
5.1.1	Belanja Pegawai	405.867.040.151,13
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa Belanja	329.007.092.585,99
5.1.5	Hibah	75.385.081.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.637.328.000,00
5.2	BELANJA MODAL	229.956.676.549,59
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.800.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.887.867.648,59
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.134.873.963,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.620.934.938,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	513.000.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.100.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	2.100.000.000,00
6	TRANSFER	291.143.923.772,71
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	291.143.923.772,71
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	80.888.526.372,71
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	209.755.397.400,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	500.000.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	1.812.516.320,14
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	329.846.176.698,06
7.1.1	Penggunaan SiLPA	61.714.781.301,41
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	268.131.395.396,65
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	274.514.131.714,00
7.2.8	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	274.514.131.714,00
	PEMBIAYAAN NETTO	55.332.044.984,06
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	57.144.561.304,20

Sumber : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2019



G. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Apabila isu-isu tidak diantisipasi untuk diselaraskan dan disepadankan maka akan berpotensi gagal dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Jika itu sebuah peluang, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang dapat berasal dari lingkungan strategis eksternal baik itu isu internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sebagai Kabupaten Kepulauan yang berhadapan langsung dengan Pasifik dan akses laut dan udara cukup terbuka maka pengaruh eksternal sangat besar. Oleh sebab itu dalam menetapkan isu-isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019–2023 telah dipaparkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka teridentifikasi aspek-aspek lingkungan strategis skala internasional dan nasional dan permasalahan-permasalahan yang berpengaruh langsung dalam pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Maka dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

- 1) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan

Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Biak Numfor berhubungan dengan masalah pokok antara lain; masih rendahnya akses layanan pendidikan, kualitas penyelenggaraan pendidikan belum optimal, nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat belum terimplementasi dengan optimal, derajat kesehatan masyarakat



masih perlu ditingkatkan, tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, dan masih tingginya angka kemiskinan.

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudahan akses dan mutu pendidikan sangat diperlukan dalam rangka menaikkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan melanjutkan sekolah (Expected Years of School). Pembangunan sumberdaya manusia juga harus diimbangi dengan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah klasik yang masih terjadi yaitu kekurangan guru di hampir semua jenjang pendidikan serta peningkatan kompetensi guru, sehingga perlu perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.

Peningkatan derajat kesehatan akan mempengaruhi usia harapan hidup karena akan mengurangi fluktuatifnya angka kesakitan dan juga angka kematian ibu – bayi – balita. Penyelesaian permasalahan pendidikan dan kesehatan akan menaikkan IPM yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Biak Numfor mencapai nilai 71,56. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Papua yang sebesar 59,09. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kabupaten Biak Numfor masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM. Selain itu, peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor juga perlu mendapatkan perhatian serius mengingat selama ini RSUD Biak telah melayani pasien rujukan di wilayah saireri, sehingga kualitas pelayanan perlu lebih ditingkatkan.



Meskipun angka pengangguran rendah dan cenderung turun, namun Pemerintah Kabupaten Biak Numfor harus mengatasi permasalahan yaitu perkembangan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan pertambahan jumlah angkatan kerja. Kualitas dan produktifitas tenaga kerja juga menjadi perhatian, mengingat di era global dituntut tenaga kerja yang berdaya saing untuk dapat eksis.

Permasalahan penurunan angka kemiskinan yang muncul adalah bahwa semakin kecil persentase kemiskinan, maka akan semakin sulit melakukan penurunan, karena sudah semakin detail mengarah kepada individu yang spesifik mengalami kondisi miskin. Hal ini menjadi sulit, karena jenis kemiskinan ataupun penyebab kemiskinan ikut bagian sebagai kendala.

Selain itu, Kebijakan Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin juga sering menjadi permasalahan, khususnya terkait dengan kebijakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik dalam hal pemerataan kesempatan bekerja ataupun pemerataan kesempatan berusaha, yang pada akhirnya akan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita penduduk (perlu disesuaikan dengan data karena Indeks Gini dan PDRB menunjukkan tren positif)

2) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan pemerintahan, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik menjadi faktor yang harus dipenuhi. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala dalam tata kelola pemerintahan. Permasalahan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, belum optimalnya pengelolaan keuangan



daerah, belum optimalnya keterbukaan informasi publik, dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab Biak Numfor sampai dengan saat ini dapat dikatakan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari predikat akuntabilitas sampai dengan tahun 2017 masih pada level “C”. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa salah satu kelemahan yang menjadi penyebab rendahnya nilai akuntabilitas Kabupaten Biak Numfor adalah belum optimalnya penyusunan penjabaran cascading kinerja untuk setiap tingkatan jabatan. Indikator juga belum sepenuhnya memenuhi kaidah SMART, yaitu; Spesific, Measureable, Attainable, Relevant dan Timely.

Akuntabilitas keuangan ditunjukkan dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil capaian akuntabilitas keuangan Kabupaten Biak Numfor mengalami penurunan. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor belum mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seperti yang diharapkan. Sebaliknya Opini yang diterima adalah yang opini terendah yaitu Disclaimer (tidak memberikan pendapat). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kabupaten Biak Numfor agar dapat memperoleh Opini WDP bahkan WTP. WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik, sehingga good and clean government dapat terwujud. Namun demikian, pengelolaan tata pemerintahan perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.



Sektor pelayanan publik juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan dimana kualitas SDM aparatur sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah masih tergolong rendah dengan tingkat disiplin kerja yang juga masih tergolong rendah. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat terutama dari segi inovasi pelayanan publik yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Disisi lain, permasalahan terkait lahan pemerintah yang belum sepenuhnya terselesaikan menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan, sehingga perlu untuk ditangani dengan lebih serius. Belum tuntasnya penegasan batas wilayah antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan pemerintah Kabupaten Supiori juga menjadi polemik yang perlu mendapatkan perhatian serius.

- 3) Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah

Penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Biak Numfor masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 19,84% sementara kontributor tertinggi kedua adalah sektor administrasi pemerintahan menyumbang 17,97% kemudian diikuti oleh sector perdagangan sebesar 17,77% dalam struktur PDRB Kabupaten Biak Numfor tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor sebagian besar ditopang oleh sektor-sektor ekonomi kreatif, namun belum semua potensi ekonomi kreatif digali dan dikembangkan secara optimal sehingga sektor pariwisata belum dapat dioptimalkan .

Permasalahan belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; pertumbuhan industri



rendah, masih rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Biak Numfor, masih rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM, belum optimalnya nilai ekspor Perdagangan, belum optimalnya hasil produksi perikanan di Kabupaten Biak Numfor, serta masih minimnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas seni dari masyarakat.

Kualitas produk menjadi faktor yang harus mendapatkan perhatian di era pasar global. Produk yang tidak berdaya saing akan sulit sekali memasuki pasar regional maupun internasional. Dengan demikian, hanya produk dengan keunggulan kompetitif dan komparatif yang bisa bertahan di pasar global. Pasar global juga menuntut pelaku industri dalam penguasaan akses dan informasi pasar.

Produk perikanan merupakan produk unggulan di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini juga didukung dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua dimana Biak Numfor menjadi target pengembangan kawasan industri perikanan dan pariwisata. Namun demikian produksi perikanan tangkap di Kabupaten Biak Numfor masih kurang optimal karena masih rendahnya produksi ikan yang didaratkan di TPI Biak. Di sisi pengolahan perikanan, masih ditemukan kualitas produk yang kurang berdaya saing dengan skala micro, sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan menjadi industri dengan skala lebih besar yang dapat berdampak positif bagi pendapatan asli daerah.

Dari sektor pariwisata, pengemasan obyek wisata budaya belum terintegrasi dengan aspek sosial lainnya, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Destinasi wisata bahari yang menjadi unggulan pun belum tertata secara sistem dan terhubung dengan pendukung lainnya, baik infrastruktur, moda angkutan akses ke lokasi wisata, sarana prasana akomodasi



dan penginapan serta pemasaran wisata dan kerjasama dengan pihak swasta. Mengingat kondisi geografis pulau biak yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut. Penciptaan brand identity sebuah obyek wisata juga belum dilakukan dalam rangka menciptakan brand image. Dengan masuknya festival Byak Munara Wampasi dalam kalender tahunan pariwisata nasional diharapkan menjadi daya ungkit bagi perkembangan pariwisata di Kabuten Biak Numfor kedepan.

Dari sektor jasa, perlu adanya pengembangan di bidang jasa transportasi dan perdagangan mengingat letak geografis pulau biak yang cukup strategis akan mempengaruhi daerah-daerah sekitar dan sesuai dengan RTRW Nasional 2007-2027 dimana Biak Numfor diarahkan untuk pengembangan pelabuhan nasional dan bandara pusat penyebaran tersier, sehingga menjadi peluang bagi pemerintah kabupaten biak numfor dalam menentukan arah kebijakan kedepan.

- 4) Belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek

penting untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Permasalahan belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; belum optimalnya penanganan kawasan kumuh, belum optimalnya Infrastruktur jaringan jalan yang dapat



melayani warga, belum optimalnya kualitas ruang publik kreatif, belum optimalnya penataan kawasan strategis serta rendahnya kualitas lingkungan hidup.

Penanganan kawasan kumuh memerlukan upaya terintegrasi dalam pemenuhan standar kualitas lingkungan permukiman, antara lain; penanganan genangan banjir dan rob, pelayanan sampah, pelayanan air minum, kualitas perumahan penduduk berpenghasilan rendah, dan pelayanan air limbah permukiman. Penanganan sampah permukiman dan penanganan air limbah permukiman masih memerlukan upaya lebih dalam mengurangi kawasan kumuh.

Berkaitan dengan pelayanan air minum, Kabupaten Biak Numfor memiliki ketergantungan air baku dari sumber mata air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melayani wilayah perkotaan. Sementara pemanfaatan sumur dalam, baik oleh masyarakat umum ataupun swasta seperti hotel ataupun perusahaan dapat menjadi pemicu terjadinya penurunan permukaan tanah.

Dilihat dari penataan dan pemanfaatan ruang untuk memberikan rasa nyaman bagi warga, penyediaan fasilitas publik pada kawasan strategis serta pengawasan pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas lingkungan khususnya penyediaan ruang terbuka hijau akan menaikkan kenyamanan warga Kabupaten Biak Numfor.

Disisi lain, penanganan permasalahan sampah sampai sejauh ini sudah tertangani dengan cukup baik oleh pemerintah daerah, namun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah sehingga diharapkan dengan pengembangan inovasi Bank Sampah yang lebih optimal mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

A. VISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 – 2023

Visi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan visioner yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (leverage) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkannya. Visi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2019-2023. Dengan menyadari keberadaan dan kondisi faktual (isu-isu strategis) seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial ekonomi, budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya, serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, maka disusun rumusan Visi Kabupaten Biak Periode Tahun 2019-2023 yaitu:

**“BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN
BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG
BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN”**



B. MISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 – 2023

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka telah ditetapkan 4 Misi Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima
- 4) Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang.

Misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 - 2023

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan mutu pendidikan
		meningkatnya budaya baca masyarakat
		terwujudnya Biak Numfor sebagai kota tujuan belajar wilayah Saireri dan Papua
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat dan akses kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas manajemen rumah sakit dan puskesmas
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat
	Meningkatkan partisipasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya pembinaan pemuda bagi pemuda
		Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja
	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Religiusitas Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya pelayanan sosial dan keagamaan kepada masyarakat
		meningkatnya suasana damai dan kepastian hukum
		terwujudnya proteksi terhadap nilai-nilai adat dan budaya asli biak



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan
		meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan
		terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada sektor ekonomi kreatif dan UMKM
	Meningkatkan Potensi Kawasan Strategis dalam Memajukan Sektor Perdagangan dan Investasi	Meningkatkan skala usaha jasa perdagangan
		Meningkatnya daya saing dan investasi antar wilayah
		Bertumbuhnya iklim investasi pada sektor-sektor unggulan daerah
	Meningkatkan Keunggulan dan Daya Tarik Promosi Wisata	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata bagi masyarakat
Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah)		
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang baik, bersih dan disiplin
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan	meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak
Misi 4 Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang	Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang perkembangan wilayah	Peningkatan aksesibilitas dalam mendukung pengembangan infrastruktur wilayah
		Implementasi rencana tata ruang wilayah secara konsisten
		Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
		Meningkatnya ketersediaan energi baru terbarukan
		Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antar wilayah
	Mewujudkan kesadaran pengelolaan lingkungan dalam pembangunan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 - 2023



C. PERENCANAAN KINERJA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Biak Numfor Tahun 2019 – 2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 yang ditanda tangani Bupati Biak Numfor. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bupati Biak Numfor Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Prestasi LKIP Kabupaten	C
		2. Opini BPK terhadap LKD	WDP
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	2,90%
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	68,4 Tahun
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	1. APK SD / MI	95,82
		2. APK SMP / MTs	86,87
		3. APM SD / MI	78,73
		4. APM SMP / MTs	81,25
		5. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	66,36
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perdagangan dan Pertanian	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	63.547 Org
		2. Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata	3 Hari
		3. Objek Wisata Unggulan yang Berkembang	16 Objek
		4. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	83,15 Ton
		5. Tingkat Konsumsi Ikan	46,40%
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap	180 Org
7	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	16,80%
		Presentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	39,20%
8	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang Dilestarikan	65%
		Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif	5 Sanggar



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tahun 2019, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran / indikator kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana / target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

NO.	NILAI KINERJA	PREDIKAT KINERJA
1	≥ 95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN (%)	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	≥ 95
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	2	50%		Cukup Berhasil		
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	58,02%		Cukup Berhasil		
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	74,23%		Cukup Berhasil		
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	5	92,95			Berhasil	
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perdagangan dan Pertanian	5	106%				Sangat Berhasil
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	111%				Sangat Berhasil
7	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	2	132%				Sangat Berhasil
8	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	2	457%				Sangat Berhasil
Jumlah		19					



Hasil pengukuran kinerja sesuai sasaran dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah” dengan 2 (Dua) indikator yaitu Predikat LAKIP Kabupaten dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah mencapai 50% dan termasuk predikat “Cukup Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Predikat LKIP Kabupaten	Predikat	C	C	100%
2	Opini BPK terhadap LKD	Opini	WDP	DISCLAIMER	0%
Rata-Rata Capaian					50%

Sumber Data : Sekretariat Daerah dan BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Pencapaian sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Predikat LKIP Kabupaten

Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah disampaikan pada tanggal 24 Februari 2020. Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 adalah 33,16 predikat “C”, penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih sangat rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan mendasar.

Hal ini sesuai surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



B/244/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

Capaian kinerja Predikat LAKIP Kabupaten sebesar 100% dihitung dari perbandingan realisasi predikat LAKIP Pemerintah Kabupaten Biak Numfor (predikat C) dibagi target (predikat C) dikali seratus persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 predikat LKIP Kabupaten Biak Numfor tidak mengalami peningkatan atau penurunan predikat yaitu tetap predikat C.



Sekretaris Daerah Kab. Biak Numfor Markus O. Mansnembra, S.H., M.M. ketika menerima Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019

2) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Opini BPK terhadap LKD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 adalah Disclaimer. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus berbenah dalam pengelolaan keuangan daerah, mengingat selama 4 tahun berturut-turut opini laporan keuangan disclaimer, dikarenakan banyak kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan daerah terkait asset tetap pencatatannya belum tertib, keberadaannya yang belum jelas, penyajian nilainya yang tidak dapat diyakini



kewajarannya, serta kejelasan status kepemilikannya. Pengelolaan kas tidak tertib, yaitu terkait pertanggungjawaban yang belum dapat disajikan kepada tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dan belum ada penyelesaian atas masalah pertanggungjawaban keuangan hasil pemeriksaan sebelumnya. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, terkait pengelolaan persediaan juga belum tertib, ditambah lagi belanja daerah yang tidak didukung dengan bukti yang cukup serta adanya belanja yang penganggaran yang tidak sesuai peruntukkan. Masih terdapat kelemahan-kelemahan yang lain, termasuk pelaporan kebijakan akuntansi tentang piutang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kondisi tersebut di atas menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius bagi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk mengejar ketertinggalannya dengan berjuang semaksimal mungkin dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 lebih transparan, akuntabel dan dijamin validitasnya dalam rangka mendapat peningkatan opini dari BPK RI lebih baik, minimal Wajar Dengan Pengencualian (WDP). Jika dibandingkan dengan Opini BPK terhadap LKD Tahun 2018 maka tidak mengalami peningkatan maupun penurunan opini yaitu tetap Disclaimer.



Sekretaris Daerah Kab. Biak Numfor Markus O. Mansnembra, S.H., M.M. ketika menerima Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1
Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2023
1	Predikat LKIP Kabupaten	Predikat	C	C	BB
2	Opini BPK terhadap LKD	Opini	DISCLAIMER	DISCLAIMER	WTP

Sumber Data : Sekretariat Daerah dan BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penjabaran rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dokumen Perjanjian Kinerja hingga level terendah tidak selaras. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada;
- 2) Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Daerah (LKD) yang belum dapat disajikan kepada tim pemeriksa dan belum ada penyelesaian atas masalah pertanggungjawaban keuangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
- 3) Pelaporan kebijakan akuntansi tentang piutang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 58,02% dan termasuk predikat “cukup berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 2 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.4 Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	2,904	1,685	58,02

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Realisasi Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 adalah sebesar 1,685%, dihitung dari:

$$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\% = \frac{20.218.852.246}{1.199.876.896.255} \times 100\% = 1,685\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai berakhirnya TA. 2019 sebesar Rp. 20.218.852.246,53 (dua puluh miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) yang terdiri atas Realisasi :

- Pendapatan Pajak daerah sebesar Rp. 10.278.028.783,20,
- Pendapatan Retribusi daerah Rp. 2.841.153.619,00
- Pendapatan Lain – lain PAD Yang sah Rp. 2.841.153.619,00

Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan sampai berakhirnya TA. 2019 sebesar Rp. 967.066.015.003,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh enam juta lima belas ribu tiga rupiah) yang terdiri atas realisasi :

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
Rp. 901.601.670.284,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
Rp. 32.258.636.567,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
Rp. 28.065.908.152,00
- Bantuan Keuangan – LRA
Rp. 5.139.800.000,00



Sedangkan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir TA. 2019 sebesar Rp 212.592.029.006 (Dua Ratus Dua Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah Enam Sen).

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2
Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2023
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	1,13	1,658	10

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seperti tahun sebelumnya bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan potensi Pendapatan Asli daerah yang ada belum sepenuhnya dioptimalkan sedangkan potensi yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan secara optimal khususnya aset daerah yang dimiliki;
- 2) Manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal, efisien dan efektif;
- 3) Kualitas sumber daya manusia belum memadai sehingga kurang berkembangnya upaya peningkatan ekonomi lokal;
- 4) Sistem Adminitrasi Pemerintahan yang belum tertata dengan baik, sehingga pelaksanaan reformasi anggaran daerah belum optimal;
- 5) Kualitas layanan publik yang masih rendah menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif;
- 6) Kesadaran dari wajib pajak dan wajib retribusi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;



- 7) Belum siapnya Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada wajib pajak dan wajib retribusi bahwa uang yang dipungut memberikan manfaat pada masyarakat pada umumnya;
- 8) Tingkat persaingan antar daerah dalam meraih peluang semakin tajam;
- 9) Kondisi perekonomian dan permasalahan tanah yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor menghambat keinginan investor untuk menanamkan modal di daerah.

3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan indikator kinerja “Angka Harapan Hidup” mencapai 74,23% dan termasuk predikat “cukup berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 3 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,4	74,2	109

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Biak Numfor mencapai 109%, dari target 68,4 tahun terealisasi 74,2 tahun.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3
Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2023
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68	74,2	70

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2019



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.8 Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2019

Uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan	Anggaran setelah perubahan Jumlah	Realisasi Jumlah	Presentase (%)
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,893,781,180	5,867,535,865	99.6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	105,800,000	105,800,000	100
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15,000,000	15,000,000	100
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6,429,558,510	6,364,222,369	98.98
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	26,714,792,557	24,222,605,840	90.67
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	408,488,800	-	0.00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	446,300,000	445,483,000	99.82
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	3,339,000,000	3,313,984,450	99.25
Penyusunan Renstra SKPD	15,000,000	15,000,000	100.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,139,604,000	1,123,954,000	98.63
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2,622,824,920	2,035,849,300	77.62
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	1,920,181,000	793,811,000	41.34
Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu & jaringannya	33,885,265,000	25,925,420,097	76.51
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	296,812,000	293,512,000	98.89
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	0,00
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Asli Papua	391,100,000	391,100,000	100
Pelatihan Pos Kesehatan Kampung	95,900,000	95,279,600	99.35
Program Peningkatan Kesehatan Perorangan	10,591,700,000	391,700,000	3.70
JUMLAH	94,311,107,967	71,400,257,521	75.71

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 71.400.257.521,- dari anggaran sebesar Rp 94.311.107.967,- atau 75,71%. Realisasi keuangan sebesar 75,71% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 109%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Angka Harapan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya peningkatan kegiatan bidang kesehatan melalui program Upaya kesehatan masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Perbekalan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin, Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas Dan Jaringannya, Program Kesehatan Rujukan, Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular.



Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd. ketika meresmikan Bangunan Baru Puskesmas Napdori Distrik Biak Barat Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019



- 2) Kualitas kesehatan masyarakat semakin baik berdasarkan indikator kinerja antara lain:

a) Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi di Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 sebesar 0,87 per seribu kelahiran hidup, meningkat bila dibandingkan dengan AKB tahun 2016 sebesar 13,6 per seribu kelahiran hidup, angka kematian bayi di Kabupaten Biak Numfor sangat rendah bila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal sebesar 23 kelahiran perseribu kelahiran hidup.

b) Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka kematian balita merupakan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH).

Kematian balita di Kabupaten Biak Numfor (AKABA) di Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 sebesar 0,87 per kelahiran hidup, menurun bila dibandingkan dengan AKABA tahun 2017 sebesar 20,4 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian balita di Kabupaten Biak Numfor telah mencapai standar pelayanan minimal secara nasional sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Rendahnya AKABA di Kabupaten Biak disebabkan karena dilakukan perbaikan disemua jenjang pelayanan kesehatan, sehingga berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.

c) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan) selama masa kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup (KH). Angka Kematian Ibu di Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 sebesar 87,79 per 100.000 kelahiran hidup, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan AKI tahun sebelumnya sebesar 273 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu di Kabupaten Biak Numfor telah mencapai target jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup (sesuai dengan target MDGs 2015)



Sekretaris Daerah Kab. Biak Numfor Markus O. Mansnembra, S.H., M.M. dan Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kab. Biak Numfor Friets G. Senandi, S.Sos ketika mengunjungi RSUD Kab. Biak Numfor dalam rangka memantau kegiatan Pelayanan di RSUD Kab. Biak Numfor Tahun 2019



4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan” dengan 5 (Lima) indikator kinerja mencapai 92,95% dan termasuk predikat “Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 4 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	APK SD / MI / Paket A	Persen	95,82	92,08	96,09
2	APK SMP / MTS / Paket B	Persen	86,87	86,07	99,07
3	APM SD / MI / Paket A	Persen	78,73	72,06	91,52
4	APM SMP / MTS / Paket B	Persen	81,25	67,61	83,21
5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	66,36	62,95	94,86
Rata-Rata Capaian					92,95

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) APK SD / MI / Paket A

Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD, MI dan Paket A di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar 92,08 % artinya dari 15.266 orang anak usia 7 – 12 tahun, baru 14.126 orang anak yang sekolah tingkat SD, MI dan Paket A. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 95,15% mengalami penurunan sebesar 3,07%.

2) APK SMP / MTS / Paket B

Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SMP, MTs dan Paket B di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar 86,07 % artinya dari 13.863 orang anak usia 13 - 15 tahun, baru 12.014 orang anak yang sekolah tingkat SMP, MTs dan Paket B. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 84,87% mengalami peningkatan sebesar 1,2%.



3) APM SD / MI / Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM) Siswa SD, MI dan Paket A di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar 72,06 % artinya dari 19.604 orang anak usia 7 – 12 Tahun baru 14.126 orang anak yang sekolah di tingkat SD, MI dan Paket A. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 75,29% mengalami penurunan sebesar 3,23%.

Berkaitan dengan program wajib belajar 9 Tahun, kondisi ini masih perlu ditingkatkan, sebab idealnya semua penduduk usia 7 – 12 tahun harus bersekolah dan menyelesaikan jenjang minimal pendidikan SD. Untuk itu Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian terhadap keadaan ini untuk ditingkatkan di masa datang.

4) APM SMP / MTS / Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) Siswa SMP, MTs dan Paket B di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar 67,61 % artinya dari 17.769 orang anak usia 13 - 15 Tahun baru 12.014 orang anak yang sekolah di tingkat SMP, MTs dan Paket B. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 81,44% mengalami penurunan sebesar 13,83%.

5) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Untuk peningkatan mutu pendidikan dilakukan pula tugas belajar bagi guru – guru untuk program S1, S2 dan S3 dan guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D – IV dapat dihitung dari jumlah guru di Kabupaten Biak Numfor yang berijazah S1 dan D-IV sebanyak 622 dari 1.145 jumlah guru jenjang SD / MI dan 418 dari 507 jumlah guru jenjang SMP / MTs. Berdasarkan angka tersebut diketahui bahwa persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D – IV sebesar 62,95 %.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sama sebesar 62,95%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4
Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2023
1	APK SD / MI / Paket A	Persen	95,15	92,08	98,50
2	APK SMP / MTS / Paket B	Persen	84,87	86,07	94,87
3	APM SD / MI / Paket A	Persen	75,29	72,06	92,50
4	APM SMP / MTS / Paket B	Persen	81,44	67,61	80,50
5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	62,95	62,95	80,00

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor Tahun 2019



Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd. ketika bertemu para anak TK Ade Irma dan Pelajar SD di Kampung Wirmaker dalam Program Peningkatan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019



Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.11 Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2019

Uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan	Anggaran setelah perubahan Jumlah	Realisasi Jumlah	Presentase (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	800,000,000	674,731,282	84
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25,000,000	5,000,000	20
Program Pendidikan Anak Usia Dini	4,672,532,937	4,670,427,200	100.0
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	11,849,908,063	10,847,179,465	91.5
Program Pendidikan Non Formal	1,302,000,000	1,176,700,000	90.4
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	225,000,000	224,539,500	99.8
Program Pendidikan Non Formal dan In Formal	600,000,000	200,000,000	0.3
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Jenjang SD)	5,586,086,000	2,771,206,150	49.6
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (SMP)	1,882,482,567	1,225,376,900	65.1
Program Pendidikan Menengah ATAS (SMA)	1,120,312,500	1,094,727,250	97.7
Program Pendidikan Tinggi	598,987,190	590,087,190	98.5
JUMLAH	36,861,909,258	23,479,974,937	63.70

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 23.479.974.937,- dari anggaran sebesar Rp 36.861.909.258,- atau 63,70%. Realisasi keuangan sebesar 63,70% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 92,95%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan baik gedung kelas maupun sarana prasarana pendidikan lainnya yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor secara berkelanjutan.
- 2) Adanya penambahan tenaga di bidang pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, baik melalui perekrutan Tenaga Guru Kontrak Daerah, maupun penambahan melalui formasi Guru Garis Depan pada tahun 2017 yang merupakan program pemerintah pusat dimana Kabupaten Biak Numfor mendapat 80 Guru yang didalamnya merupakan guru kelas dan guru bidang studi.
- 3) Dalam meningkatkan kualifikasi guru dilakukan kemitraan aktif dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Biak yang membuka program studi PGSD dan Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu di Kabupaten Biak Numfor telah terdapat beberapa pula beberapa perguruan tinggi seperti ATB, AKPARIS, AKPERIK, AKPER, STIE Koreri, STIH, STKIP, D3 dan S1 Keperawatan dan IISIP Yapis Biak serta program Pascasarjana Magister Administrasi yang juga menjadi penunjang keberhasilan bidang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.



Asisten Bidang Administrasi Umum Ir. Andarias F. Lameky, M.M, ketika meresmikan sarana pendidikan di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019



5. Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perdagangan dan Pertanian” dengan 5 (Lima) indikator kinerja mencapai 106% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 5 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	63.547	43.448	68%
2	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata	Hari	3	4	133%
3	Objek Wisata Unggulan yang Berkembang	Objek	15	20	125%
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	83,15	84,18	101%
5	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Th	46,40	46,50	100%
Rata-Rata Capaian					106%

Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan merupakan indikator pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata. Adapun jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2019 sebanyak 43.448 wisatawan yang terdiri dari 42.759 wisatawan nusantara dan 689 wisatawan mancanegara. Data ini diambil berdasarkan LKU (Laporan Kegiatan Usaha) dari hotel-hotel. Realisasi ini masih rendah dari yang ditargetkan yaitu 63.547 wisatawan atau capaian jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 ini hanya mencapai 68%. Jika jumlah wisatawan Tahun 2019 43.448 dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada Tahun 2018 sebesar 59.238 maka terjadi penurunan jumlah wisatawan sebesar 26,66%.



Kunjungan Wisatawan
Mancanegara pada Kegiatan
Festival Biak Munara Wampasi
Tahun 2019



2) Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata

Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata dari target 3 hari terealisasi 4 hari atau mencapai 133%. Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata meningkat dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar 3 hari. Rumus penghitungan Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata adalah jumlah hari kunjungan semua wisatawan dibagi jumlah tamu yang menginap dikalikan 100%. Data ini diambil berdasarkan LKU (Laporan Kegiatan Usaha) dari hotel-hotel.

3) Objek Wisata Unggulan yang Berkembang

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus melakukan pengembangan objek wisata, mengingat sektor pariwisata Kabupaten Biak Numfor yang cukup menjanjikan yang sebagian besar objek wisatanya berupa pantai dan pulau-pulau yang indah. Objek Wisata Unggulan yang Berkembang pada Tahun 2019 sebanyak 20 Objek Wisata. Realisasi ini mencapai 125% dari target Tahun 2019 yaitu sebanyak 16 Objek Wisata. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 maka Objek Wisata Unggulan yang Berkembang Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 25% dari Realisasi Tahun 2018 sebanyak 15 Objek Wisata Unggulan yang Berkembang.



Salah satu Objek Wisata Unggulan Air Terjun Wafsarak yang berada di Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019

4) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Capaian kinerja untuk indikator Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 sebesar 84,18 ton atau menacapai 101% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 83,15 ton. Realisasi Tahun 2019 meningkat 1,23 % dibandingkan tahun 2018 yaitu 83 ton.



Nelayan di Kabupaten Biak Numfor yang sedang Memperlihatkan Hasil Perikanan Tangkapnya Tahun 2019

5) Tingkat Konsumsi Ikan

Realisasi Tingkat konsumsi ikan penduduk Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 mencapai 46,5 kg/kapita/th atau mencapai 100% dari target Tahun 2019 yaitu 46,4 kg/kapita/th. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2018 sebesar 46 kg/kapita/th maka Realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,08%.



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5
Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2023
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	59.238	43.448	80.785
2	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata	Hari	3	4	4
3	Objek Wisata Unggulan yang Berkembang	Objek	15	20	20
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	83	84,18	85
5	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Th	46	46,50	50

Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata melakukan berbagai pengembangan wisata diantaranya:
 - ✓ Tertatanya Kawasan Wisata di Goa Jepang;
 - ✓ Pembangunan Dive Center di Pulau Samberpasi dan Pantai Manswam;
 - ✓ Tertatanya Kawasan wisata Pantai Bosnik (pembangunan tempat parkir, panggung kesenian);
 - ✓ Pembangunan Fasilitas Pariwisata di Pulau Auki;
 - ✓ Pengadaan Banana Boat, Jetsky dan MeubeairHal tersebut yang menjadi faktor penarik para wisatawan untuk datang dan berwisata di Kabupaten Biak Numfor.

Objek Wisata Goa Jepang Setelah ditata dan ditingkatkan pengembangannya oleh Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor Tahun 2019



- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor senantiasa meningkatkan promosi dan sosialisasi terkait pariwisata di Kabupaten Biak Numfor yang bermuara kepada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut serta mengembangkan objek wisata.
- 3) Pada Tahun 2019 melalui kementrian Kelautan dan Perikanan RI telah dibagikan 50 unit perahu dan 100 unit motor tempel berkapasitas 15 PK merk Yamaha yang di bagikan kepada 3 koperasi di Kabupaten Biak Numfor yaitu koperasi Manna Biak Barat, Koperasi Karios Biak Utara dan Koperasi Flotin Mandiri yang turut menambah jumlah produksi dan pendapatan nelayan di Kabupaten Biak Numfor.
- 4) Meningkatnya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Biak Numfor dikarenakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Biak Numfor adalah hasil perikanan tangkap, selain itu Kabupaten Biak Numfor melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melakukan program manfaat dan pentingnya makan ikan bagi peningkatan gizi.



Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Effendi Igrisa, S.Pi., M.M. saat memberikan bantuan alat perikanan tangkap kepada salah satu nelayan Tahun 2019



6. Meningkatnya Kesempatan Kerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja” dengan 1 (Satu) indikator kinerja mencapai 111% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 6 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap	Orang	180	200	111%

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap dari Target 180 Orang Terealisasi 200 Orang atau mencapai 111%. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2018 sebesar 95 Orang maka mengalami peningkatan sebesar 52,5%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2023
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap	Orang	95	200	520

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.16 Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2019

Uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan	Anggaran setelah perubahan Jumlah	Realisasi Jumlah	Presentase (%)
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	380,000,000	332,994,100	87.63
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25,000,000	25,000,000	100.00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (OTSUS)	-	-	0,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019

Program Peningkatan Kesempatan Kerja	60,000,000	60,000,000	100.00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	30,000,000	30,000,000	100.00
Program perencanaan pembangunan daerah	20,000,000	20,000,000	100.00
LLK UKM			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	218,800,000	207,984,097	95.06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	51,200,000	-	0.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	19,000,000	95.00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	25,000,000	-	0.00
JUMLAH	830,000,000	694,978,197	83.73

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 694.978.197,- dari anggaran sebesar Rp 830.000.000,- atau 83,73%. Realisasi keuangan sebesar 83,73% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 111%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Biak Numfor dengan melakukan program sebagai berikut :
 - a. Pembinaan dan pemberdayaan LKPS di kabupaten Biak Numfor
 - b. Pelayanan Informasi pasar kerja Online
 - c. Penerapan tenaga kerja melalui antar kerja antar lokal (LAKAL)



- 2) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- 3) Dilakukannya pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan oleh UPTD LLK UKM dalam rangka meningkatkan kompetensi para pencari kerja di Kabupaten Biak Numfor seperti :
 1. Las listrik
 2. Teknik listrik
 3. Teknik otomotif
 4. Teknik bangunan
 5. Garmen apparel
 6. Teknik elektronika
 7. Teknik informasi dan komunikasi



Para Peserta Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui UPTD LLK UKM Biak bekerja sama dengan TNI dan Pihak Swasta Tahun 2019



7. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak” dengan 2 (Dua) indikator kinerja mencapai 132% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 7 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persen	16,80%	28%	167%
2	Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	39,20%	37,93%	97%
Rata-Rata Capaian					132%

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor berjumlah 25 Orang dengan 7 Orang diantaranya adalah perempuan. Realisasi Presentasi Keterlibatan Perempuan di Parlemen pada Tahun 2019 adalah 28% dihitung dari :

$$\frac{\text{Jumlah Anggota DPRD Perempuan}}{\text{Jumlah Anggota DPRD}} \times 100\% = \frac{7}{25} \times 100\% = 28\%$$

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 16,80% maka capaian indikator ini mencapai 167%.

2) Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Biak Numfor selama tahun 2019 berjumlah 29 korban dan yang mendapat pendampingan dan penyelesaian kasus kekerasan tersebut berjumlah 11 korban, sehingga realisasi Persentase Pendampingan dan



Penyelesaian Kasus Terhadap Perempuan dan Anak
adalah 37,93% dihitung dari :

$$\frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak}} \times 100\% = \frac{11}{29} \times 100\% = 37,93$$

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 39,20% maka capaian indikator ini mencapai 97%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.18 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7
Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2023
1	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persen	16,00	28,00	20,00
2	Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	24	37,93	100,00

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.19 Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2019

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan Jumlah	Realisasi Jumlah	Persentase %
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	383,500,000	359,514,996	93.75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	69,000,000	69,000,000	100.00
Program peningkatan disiplin aparatur	37,500,000	37,500,000	100.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,000,000	10,000,000	100.00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (OTSUS)	-	-	0,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (OTSUS)	-	-	0,00
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan (OTSUS)	-	-	0,00
Program Keluarga Berencana	9,649,713,000	9,522,283,400	98.68
Program perencanaan pembangunan daerah	15,000,000	-	0.00
JUMLAH	8,834,713,000	8,670,448,396	98.14

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 8.670.448.396,- dari anggaran sebesar Rp 8.834.713.000,- atau 98,14%. Realisasi keuangan sebesar 98,14% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 132%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor akan pentingnya memiliki keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah yang akan mewakili aspirasi kaum perempuan di Kabupaten Biak Numfor;
- 2) Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan perlindungan kepada Perempuan dan Anak;
- 3) Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menjaga dan melindungi Hak-Hak Perempuan dan Anak.



8. Meningkatnya Apresiasi & Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan & Pelestarian Budaya

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Apresiasi & Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan & Pelestarian Budaya” dengan 2 (Dua) indikator kinerja mencapai 457% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 8 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan	Persen	65	100	154
2	Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif	Sanggar	5	38	760
Rata-Rata Capaian					457

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Persentase Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan
Jumlah Benda, Situs, Kawasan di Kabupaten Biak Numfor berjumlah 13 dan yang dilestarikan di Kabupaten Biak Numfor berjumlah 13, artinya realisasi indikator kinerja Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan terealisasi 100%. Capaian Indikator Kinerja ini melebihi target Tahun 2019 yaitu 65% yang artinya capaian realisasi indikator ini mencapai 154%.
- 2) Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif
Hingga tahun 2019 di Kabupaten Biak Numfor terdapat 43 Sanggar Seni Budaya Asli Biak, dimana 5 Sanggar Seni Kurang Aktif dan 38 Sanggar Seni yang masih aktif. Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif dari Target 5 Sanggar Seni Budaya Terealisasi 38 Sanggar Seni Budaya atau mencapai 760%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.21 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8
Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2023
1	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan	Persen	100	85
2	Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif	Sanggar	38	30

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya apresiasi masyarakat terhadap penggalian perlindungan dan pelestarian asset budaya dan sejarah;
- 2) Adanya dukungan wadah dan media para pelaku budaya dan seni untuk mengekspresikan karyanya.



Pertunjukkan beberapa Sanggar Budaya Asli Biak yang Aktif Tahun 2019



B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan ada beberapa upaya yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 adalah:

- 1) Melakukan penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih rasional dengan mengacu pada realisasi tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2018);
- 2) Melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan perundangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.
- 5) Pemantapan sistem, kelembagaan dan operasional pemungutan pendapatan daerah, Pengembangan koordinasi secara sinergis pada bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, SKPD Penghasil serta mitra kerja terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat



1. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 secara rinci terlihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 3.22 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019
1	2	3
PENDAPATAN	1.339.909.658.379,56	1.199.876.896.255,53
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	111.056.146.086,27	20.218.852.246,53
<i>Pendapatan Pajak Daerah - LRA</i>	9.104.547.950,80	10.278.028.783,20
<i>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</i>	3.744.650.915,20	2.841.153.619,00
<i>Lain-lain PAD Yang Sah – LRA</i>	98.206.947.220,27	7.099.669.844,33
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	987.168.283.293,29	967.066.015.003,00
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA</i>	914.702.016.000,00	901.601.670.284,00
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</i>	32.258.636.567,29	32.258.636.567,00
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</i>	29.621.230.726,00	28.065.908.152,00
<i>Bantuan Keuangan – LRA</i>	0,00	5.139.800.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	241.685.229.000,00	212.592.029.006,00
<i>Pendapatan Hibah - LRA</i>	38.969.098.000,00	0,00
<i>Pendapatan Lainnya – LRA</i>	202.716.131.000,00	212.592.029.006,00
BELANJA	1.046.953.218.286,71	865.129.228.789,00
BELANJA OPERASI	814.896.541.737,12	692.794.456.426,00
<i>Belanja Pegawai</i>	405.867.040.151,13	376.825.226.191,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	329.007.092.585,99	248.188.821.235,00
<i>Belanja Hibah</i>	75.385.081.000,00	63.143.081.000,00
<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	4.637.328.000,00	4.637.328.000,00
BELANJA MODAL	229.956.676.549,59	170.234.772.363,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019

<i>Belanja Modal Tanah</i>	2.800.000.000,00	2.134.824.000,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	64.887.867.648,59	32.860.402.340,00
<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	106.134.873.963,00	84.020.130.944,00
<i>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	55.620.934.938,00	50.707.159.579,00
<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>	513.000.000,00	512.255.500,00
BELANJA TAK TERDUGA	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
<i>Belanja Tak Terduga</i>	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
TRANSFER	291.143.923.772,71	265.674.139.600,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	291.143.923.772,71	265.674.139.600,00
<i>Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</i>	80.888.526.372,71	67.061.550.000,00
<i>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</i>	209.755.397.400,00	198.312.589.600,00
<i>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</i>	500.000.000,00	300.000.000,00
SURPLUS / DEFISIT	1.812.516.320,14	69.073.527.866,53
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	329.846.176.698,06	0,00
<i>Penggunaan SiLPA</i>	61.714.781.301,41	0,00
<i>Pinjaman Dalam Negeri</i>	268.131.395.396,65	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	274.514.131.714,00	47.156.885.374,00
<i>Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan</i>	274.514.131.714,00	47.156.885.374,00
PEMBIAYAAN NETTO	55.332.044.984,06	(47.156.885.374,00)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	57.144.561.304,20	21.916.642.492,53

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2019



1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai berakhirnya tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 20.218.852.246,53 (dua puluh miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) yang terdiri atas Realisasi :

- Pendapatan Pajak daerah sebesar Rp. 10.278.028.783,20,
- Pendapatan Retribusi daerah Rp. 2.841.153.619,00
- Pendapatan Lain – lain PAD Yang sah Rp. 2.841.153.619,00

2) Pendapatan Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan sampai berakhirnya tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 967.066.015.003,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh enam juta lima belas ribu tiga rupiah) yang terdiri atas realisasi :

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
Rp. 901.601.670.284,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
Rp. 32.258.636.567,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
Rp. 28.065.908.152,00
- Bantuan Keuangan – LRA
Rp. 5.139.800.000,00

2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Seperti tahun sebelumnya bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan potensi Pendapatan Asli daerah yang ada belum sepenuhnya dioptimalkan;



- Sedangkan potensi yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan secara optimal khususnya aset daerah yang dimiliki;
 - Manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal, efisien dan efektif;
 - Kualitas sumber daya manusia belum memadai sehingga kurang berkembangnya upaya peningkatan ekonomi lokal;
 - Sistem Adminitrasi Pemerintahan yang belum tertata dengan baik, sehingga pelaksanaan reformasi anggaran daerah belum optimal;
 - Kualitas layanan publik yang masih rendah menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif;
 - Kesadaran dari wajib pajak dan wajib retribusi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - Belum siapnya Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada wajib pajak dan wajib retribusi bahwa uang yang dipungut memberikan manfaat pada masyarakat pada umumnya;
 - Tingkat persaingan antar daerah dalam meraih peluang semakin tajam;
 - Kondisi perekonomian, dan permasalahan tanah, sehingga menghambat keinginan investor untuk menanamkan modal di daerah
- 2) Solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
- Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan prospek pengembangannya;
 - Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas pendidikan sesuai spesifikasi/kebutuhan daerah;
 - Peningkatan kualitas jasa pelayanan publik dan perluasan jaringan sistem pelayanan;



- Penguatan dan pengembangan basis ekonomi rakyat dan perluasan lapangan kerja melalui Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mengatasi dampak ekonomi;
- Pengembangan dan mempercepat pengadaan infrastruktur dasar publik yang diarahkan guna mendukung pengembangan wilayah; dan
- Peningkatan pembangunan pada desa melalui dana desa dan alokasi dana desa;
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban melalui penegakan peraturan daerah melalui sosialisasi

3. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk:

- 1) Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2018 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.



Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesuai Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), maka orientasi penganggaran guna belanja daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang & jasa non investasi, belanja pemeliharaan, pembayaran bunga hutang, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial.

a) Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam pengertian tersebut uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai yang bersifat tetap (fixed cost).

Realisasi belanja pegawai secara keseluruhan sampai dengan Akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp.376.825.226.191,00 atau 92,84% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 405.867.040.151,13



b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Untuk belanja barang dan jasa sampai dengan akhir tahun 2019 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.329.007.092.585,99 telah direalisasi sebesar Rp.248.188.821.235,00 atau mencapai 75,43 persen.

c) Belanja Hibah.

Belanja hibah ini digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah



perjanjian hibah daerah. Masing-masing dengan kriteria sebagai berikut:

- ✓ Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- ✓ Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- ✓ Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Untuk Belanja hibah Tahun Anggaran 2019 telah realisasi sebesar Rp. 63.143.081.000,00. atau mencapai 83,76 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 75.385.081.000,00.

d) Belanja Bantuan Sosial.

Bantuan sosial (bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, namun Pemerintah Daerah pada APBD 2019 mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial tersebut. Sebesar Rp. 4.637.328.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.637.328.000,00 atau 100%.



2) Belanja Modal

Belanja Modal Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (Dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Yang diharapkan berdampak pada meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Realisasi belanja modal sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai Rp.170.234.772.363,00 atau ekuivalen 74,02% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 229.956.676.549,59

3) Belanja Tidak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, untuk belanja tidak terduga sampai dengan akhir tahun 2019 realisasinya Rp. 2.100.000.000,00 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.100.000.000,00

4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, untuk bantuan keuangan kepada pemerintah



desa sampai dengan akhir triwulan dua realisasinya mencapai 94,54 % atau sebesar Rp. 198.312.589.600,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 209.755.397.400,00.

4. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan mencakup :

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
- b) Pencairan dana cadangan
- c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Penerimaan pinjaman daerah
- e) penerimaan kembali pemberian pinjaman
- f) penerimaan piutang daerah.



2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- Pembentukan dana cadangan
- Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah
- Pembayaran pokok utang
- Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.22 berikut:

Tabel 3.23 Pembiayaan Daerah Tahun 2019

PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3
BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.416.538.000,00	25.123.418.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	25.416.538.000,00	25.123.418.000,00
<i>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya</i>	25.416.538.000,00	25.123.418.000,00
BELANJA LANGSUNG	11.396.086.755,00	11.096.707.042,00
Belanja Barang dan Jasa	5.430.259.100,00	5.430.079.100,00
<i>Belanja Bahan Pakai Habis</i>	178.378.000,00	178.378.000,00
<i>Belanja Bahan/Material</i>	201.300.000,00	201.300.000,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019

<i>Belanja Jasa Kantor</i>	1.082.650.250,00	1.082.650.250,00
<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>	160.000.000,00	160.000.000,00
<i>Belanja Pemeliharaan</i>	1.405.687.650,00	1.405.507.650,00
<i>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</i>	2.402.243.200,00	2.402.243.200,00
Belanja Modal	5.965.827.655,00	5.666.627.942,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor</i>	50.000.000,00	50.000.000,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga</i>	99.750.000,00	99.750.000,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer</i>	922.740.000,00	922.740.000,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</i>	311.800.000,00	311.800.000,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran</i>	29.700.000,00	29.700.000,00
<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</i>	2.611.848.800,00	2.611.848.800,00
<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal</i>	19.400.000,00	19.400.000,00
<i>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan</i>	1.920.588.855,00	1.621.389.142,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	274.514.131.714,00	47.156.885.374,00
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	274.514.131.714,00	47.156.885.374,00
<i>Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan</i>	274.514.131.714,00	47.156.885.374,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019

Kondisi yang tidak bisa dihindari terkait besarnya defisit APBD Tahun Anggaran 2019 dan beban hutang daerah kepada pihak ketiga yang cukup tinggi menjadi permasalahan utama pembiayaan yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kedepan.



1. Permasalahan Utama Penerimaan Pembiayaan.

Permasalahan utama penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2019 terkait rencana Pemerintah Daerah melakukan pinjaman daerah sebagai sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Defisit anggaran melebihi batas kumulatif defisit akan menyulitkan pemerintah daerah dalam mencari sumber penerimaan pembiayaan daerah, baik yang berbentuk hibah maupun dalam bentuk pinjaman daerah.

2. Permasalahan Utama Pengeluaran Pembiayaan

Besarnya jumlah hutang daerah kepada pihak ketiga, menjadi permasalahan pengeluaran pembiayaan, karena tidak seimbang dengan penerimaan pembiayaan riil. Beban hutang daerah berdampak luas terhadap tatakelola keuangan daerah dan membatasi akselerasi pembangunan pemerintah daerah. Rencana pinjaman daerah jangka pendek berdampak pada kewajiban pembayaran pokok hutang dan bunga pinjaman yang dapat menyulitkan likuiditas kas daerah.



BAB IV

PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor disusun sebagai wujud berkembangnya akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2019 Rp. 1.339.909.658.379,56 terealisasi Rp. 1.199.876.896.255,53 atau 89,55 %. Disisi yang lain Pendapatan Asli Daerah Rp. 111.056.146.086,27 terealisasi 20.218.852.246,53 atau 18,20%.

Terkait upaya perbaikan akuntabilitas kinerja beberapa tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi LKIP Tahun 2018 yang telah diambil dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yaitu melakukan pengintegrasian dan pemanfaatan sistem informasi dalam penilaian kinerja OPD melalui kegiatan evaluasi kinerja (fisik dan keuangan).

Disamping itu, juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat keterkaitan indikator kinerja OPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja).

Untuk menyajikan capaian kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), serta diterapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja *online* yang berbasis website. Langkah ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan public dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.



Kami berharap melalui pelaksanaan SAKIP yang terus disempurnakan akuntabilitas kinerja aparatur dan pemerintah daerah dapat diterima oleh Pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik.

Atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dukungan instansi lain serta masyarakat semoga hasil evaluasi kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan mengalami peningkatan.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, peningkatan akuntabilitas kinerja mampu mempercepat perwujudan masyarakat Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian.

Biak, 30 April 2020

BUPATI BIAK NUMFOR

HERRY ARIO NAAP, S.Si.,M.Pd.



LAMPIRAN



BUPATI BIAK NUMFOR

Jl. Majapahit 01 Biak Telepon/Fax : 0981-21688 / 21524

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.

Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Biak, 01 April 2019

BUPATI BIAK NUMFOR

HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Prestasi LKIP Kabupaten 2. Opini BPK terhadap LKD	C WDP
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	2,90%
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	68,4 Tahun
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	1. APK SD / MI 2. APK SMP / MTs 3. APM SD / MI 4. APM SMP / MTs 5. Guru yang memenuhi Kulaifikasi S1/D-IV	95,82 86,87 78,73 81,25 66,36
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perdagangan dan Pertanian	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata 3. Objek Wisata Unggulan yang Berkembang 4. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 5. Tingkat Konsumsi Ikan	63.547 Org 3 Hari 16 Objek 83,15 Ton 46,40%
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap	180 Org
7	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Presentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	16,80% 39,20%
8	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang Dilestarikan Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif	65% 5 Sanggar

Biak, 01 April 2019

BUPATI BIAK NUMFOR



HERRY ARIO NAAF, S.Si., M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR INSPEKTORAT

Jl. Majapahit, Telpun (0981) 21981
BIAK - PAPUA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dibuat dalam kinerja yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Biak, 30 April 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN BIAK NUMFOR



MAHASUNU, S.IP.
PEMBINA TK I

NIP. 19621219 198603 1 018